



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu-isu Strategis	2
1.3 Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	14
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2 Analisis Capaian Kinerja	29
3.3 Realisasi Anggaran	54
3.4 Inovasi	56
3.5 Penghargaan	57
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Rekomendasi	58
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022	13
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	18
Tabel 2.2 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	19
Tabel 2.3 : Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	20
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	21
Tabel 2.5 : Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	22
Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	27
Tabel 3.2 : Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	28
Tabel 3.3 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	29
Tabel 3.4 : Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2020 - 2022	30
Tabel 3.5 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2023	31
Tabel 3.6 : Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	32
Tabel 3.7 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	33
Tabel 3.8 : Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	34
Tabel 3.9 : Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	43
Tabel 3.10 : Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2022	54
Tabel 3.11 : Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	4
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	5
Gambar 1.3 : Struktur Organisasi UPT Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	6
Gambar 1.4 : ASN Berdasarkan Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	11
Gambar 2.1 : Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Ungaran, Februari 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Pasal 2). Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Sedangkan untuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2016.

Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 111 Tahun 2016, terdapat perubahan pada beberapa tugas dan fungsi, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah. Tugas dan fungsi Balai Cadangan Pangan (BCP) dialihkan ke Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan. Berdasarkan Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri, perlu dibentuk Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) yang menggantikan sebagian tugas dan fungsi pada Bidang Keamanan Pangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari satuan kerja, unit organisasi, hingga kementerian/lembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Hal terpenting dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

LKj Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disusun untuk memberi gambaran penyelenggaraan program dan kegiatan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada DISHANPAN. LKj ini juga disusun sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi program dan kegiatan tahun 2022 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Isu-isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan selain mengacu pada Badan Pangan Nasional, pemilihan isu strategis juga memperhatikan kondisi di Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat berdasarkan pada prinsip Aktual, Problematik, Khalayak dan Layak (APKL) serta berdasarkan prioritas mendesak, serius dan bila tidak ditangani akan menjadi masalah (*Urgent, Serious and Growth*).

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan

Isu ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Jawa Tengah secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Jawa Tengah. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor.

Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Jawa Tengah surplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun, hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stok beras.

Ketersediaan pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, luasnya semakin terbatas.

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

2. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrem memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Distribusi dan Sistem Logistik Daerah

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah.

5. Konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

6. Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluwarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

7. Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Diterbitkannya Permentan Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan), yaitu bahwa produk PSAT yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan harus memiliki nomor register. Hal tersebut menjadi tantangan Dinas Ketahanan Pangan melalui OKKP-D dalam hal sertifikasi jaminan mutu pangan, baik dalam hal sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas.

1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

a. Mandat Kinerja

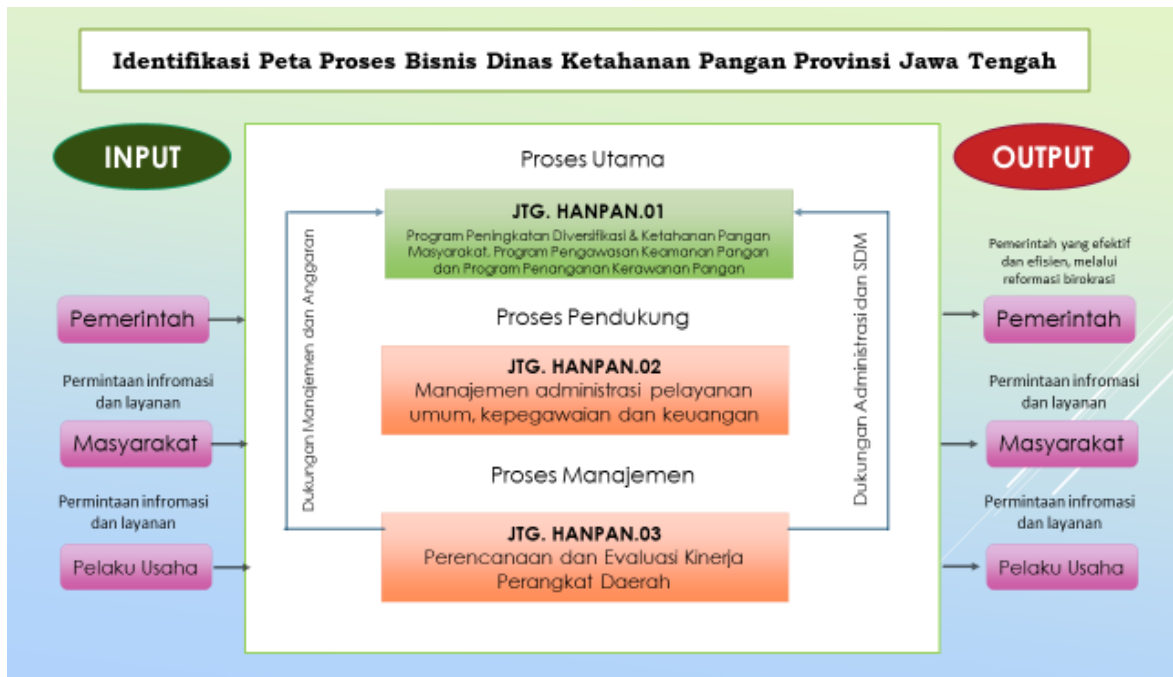
CASCADING PERUBAHAN 2018-2023 (2022)																
MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN																
IKD : SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI																
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN PANGAN YANG BERKUALITAS																
IKU : ANGKA KONSUMSI ENERGI																
PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN MASYARAKAT																
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN																
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN																
IKP : KETERSEDIAAN ENERGI PANGAN BERBAGAM DAN BERKUALITAS																
IKP : CV (COEFISIEN VARIASI) HARGA PANGAN STRATEGIS BERAS																
IKP : RASIO CADANGAN PANGAN TERHADAP KEBUTUHAN PANGAN																
IKP : ANGKA KONSUMSI BERAS																
IKP : % PSAT (PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN) YANG MEMENUHI SYARAT KEAMANAN DAN MUTU PANGAN																
IKP : % REKOMENDASI JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN																
IKP : % PENURUNAN KERAWANAN PANGAN																
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN																
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PROVINSI																
PROMOSI PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGGA REKURUPAN GIZI MELALUI MEDIA PROVINSI																
PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DISTRIBUSI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
PENANGANAN KERAWANAN PANGAN, KEWEMANGAN PROVINSI																
IK : % PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA																
IK : % PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN																
IK : RASIO KONSUMSI PANGAN LOKAL																
IK : KONSUMSI PANGAN BUAH DAN SAYUR																
IK : % PSAT (PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN) TEREKORISASI DIPERKANDARAN																
IK : JUMLAH INFORMASI DAN KERASAMAAN YANG MENINGKATKAN YANG DIFASILITASI																
IK : JUMLAH OBJEK PENGAWASAN PSAT LINTAS KAB/KOTA YANG MENINGKAT LEVEL PENERAPAN HIGIENE																
IKP : TINGKAT KEPUASAN PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM																
IKP : TINGKAT KEPUASAN PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM																
IK : % PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN																
PENYEDIAAN HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN PANGAN																
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN																
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN																
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PROVINSI																
PROMOSI PENGEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL																
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN ADVOKASI, EDUKASIDAN SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)																
REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
PENGUATAN KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR PROVINSI																
REGISTRASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA																
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGAJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN																
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROVINSI																
IKK : % BIBILITEN H PANGAN POKOK LOKAL SUBSITUSI BERAS YANG DIFASILITASI																
IKK : ANALISA NBM DAN ANALISA KETERSEDIAAN YANG DILAKSANAKAN																
IKK : % INFORMASIDAN INTERVENSI HARGA PANGAN STRATEGIS																
IKK : DATA PELAKSANAAN N RANTAI PASOK DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK																
IKK : FASILITASI TOKO TANI MITRA PASAR DAN STIMULAN GABAH PADA LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM)																
IKK : % PANGKALAN YANG DIFASILITASI																
IKK : % PROMOSI DAN EDUKASI PEMANFAATAN AN PERANGKANNI DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI																
IKK : ANALISA PPH																
IKK : LAPORAN KAJIAN PANGAN SEGAR YANG DIUWAS																
IKK : % MASYARAKAT YANG TEREDUKASI TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN																
IKK : % KELOMPOK/PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAM PENERAPAN HIGIENE SANITASI																
IKK : LAYANAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI																
IKK : SAMPEL PANGAN YANG DIUJI																
IKK : DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM BPMK (BALI PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN)																
IKK : % SAMPEL PANGAN YANG DIUJI																
IKK : PETA SKEPE DAN FSWA																

b. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan merupakan acuan untuk menggambarkan hubungan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan ditunjukkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut.

Gambar 1.1

Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah



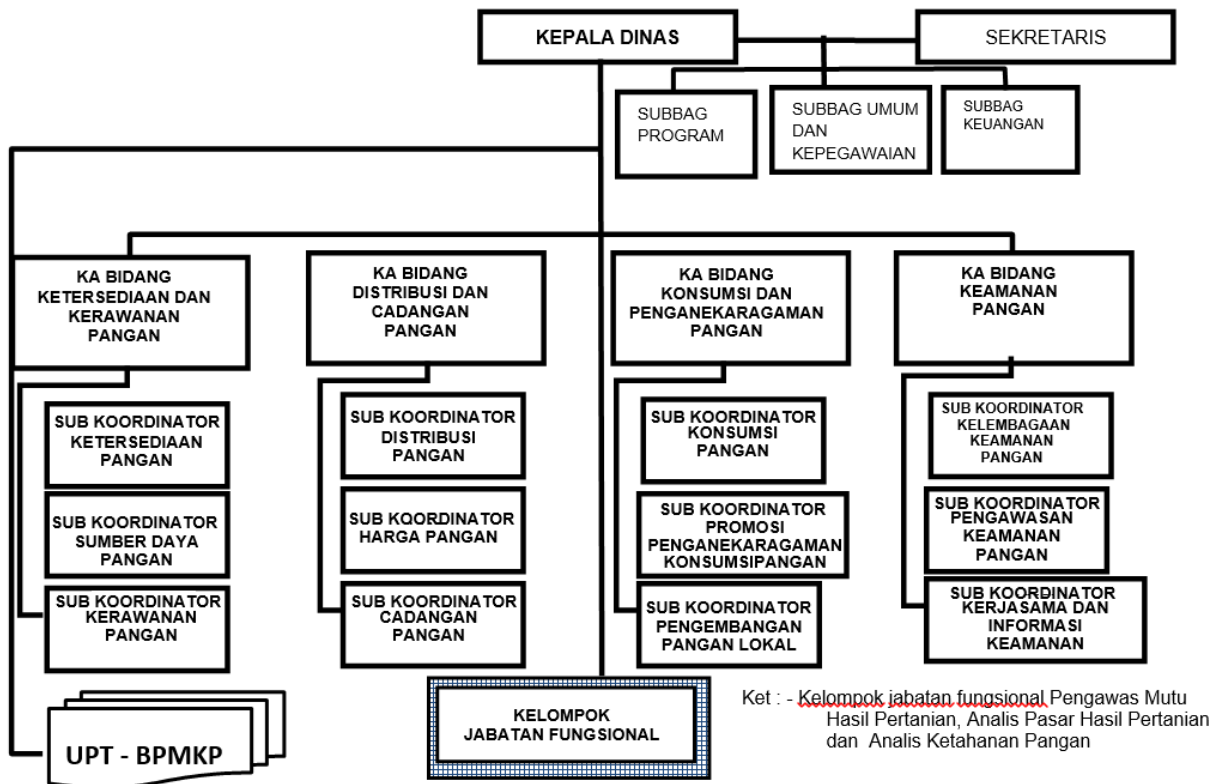
c. Struktur Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendorong dilakukannya penataan perangkat daerah hingga ditetapkan Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut menetapkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN), sedangkan pelaksanaan tugas DISHANPAN diatur dengan Pergub Jateng Nomor 66 Tahun 2016.

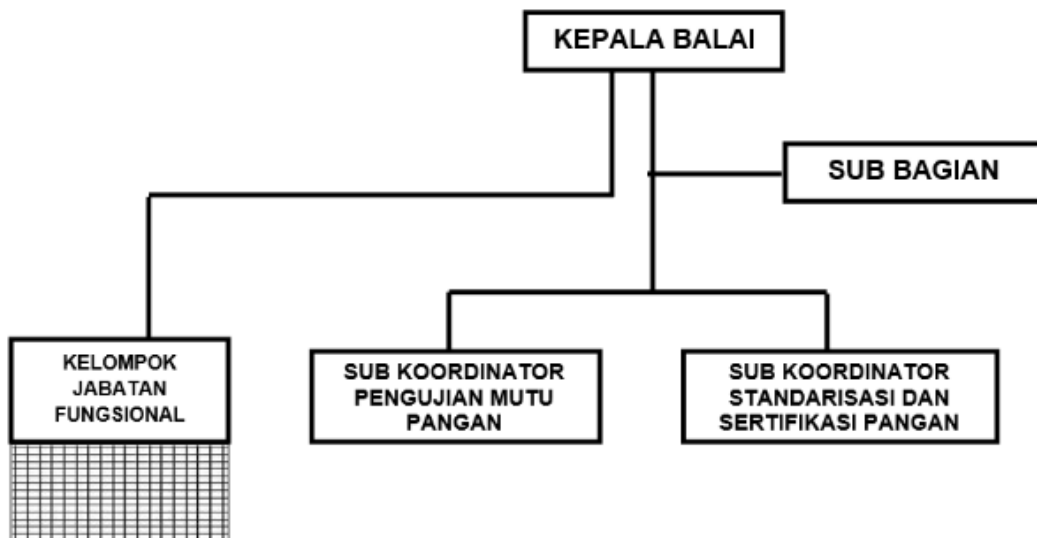
Diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah, terdapat perubahan pada beberapa tugas dan fungsi, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah. Tugas dan fungsi Balai Cadangan Pangan (BCP) dialihkan ke Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan. Berdasarkan Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri, perlu dibentuk Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) yang menggantikan sebagian tugas dan fungsi pada Bidang Keamanan Pangan.

Organisasi DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 6 (enam) Pejabat Administrator yang dibantu oleh 2 atau 3 Pejabat Pengawas sebagaimana pada Gambar 1.2

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 1.3
Struktur Organisasi UPT Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah



Tugas Pokok dan Fungsi setiap bidang, sekretariat dan UPT adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Subbagian Program, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1) **Sub bagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- 2) **Sub bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- 3) **Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, sumber daya pangan, dan kerawanan pangan. Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan Pangan membawahi Seksi Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan.

- 1) Seksi Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan;
- 2) Seksi Sumber Daya Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;
- 3) Seksi Kerawanan Pangan** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan Seksi Distribusi Pangan, Seksi Harga Pangan dan Seksi Cadangan Pangan.

- 1) Seksi Distribusi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan
- 2) Seksi Harga Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan
- 3) Seksi Cadangan Pangan** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan

4. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penganeekaragaman konsumsi pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

- 1) Seksi Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan
- 2) Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan
- 3) Seksi Pengembangan Pangan Lokal** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal

5. Bidang Keamanan Pangan

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan, dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi

Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Seksi Kelembagaan Pangan, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

- 1) Seksi Kelembagaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan

- 2) **Seksi Pengawasan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan
- 3) **Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan

6. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan di bidang peningkatan mutu dan keamanan pangan. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- b. koordinasi, pelaksanaan teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- c. menyiapkan fasilitasi sertifikat produk organik;
- d. evaluasi dan pelaporan di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- e. pengelolaan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Balai, membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengujian Mutu Pangan, Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018.

- 1) **Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- 2) **Seksi Pengujian Mutu Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu pangan.
- 3) **Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan**, mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi pangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

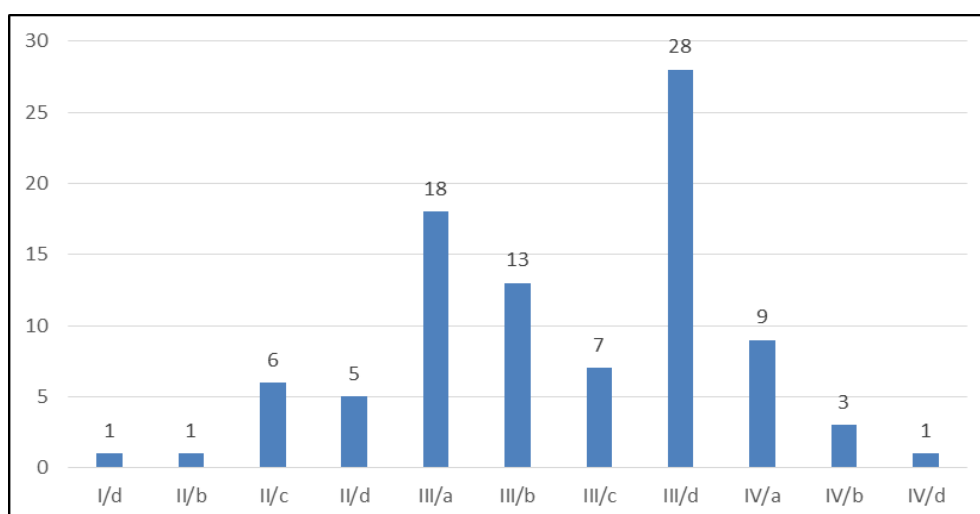
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak 88 orang. Terdiri dari 10 pejabat eselon, yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 4 orang eselon IV dan 63 jabatan fungsional umum serta 15 orang jabatan fungsional khusus yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 1.3).

Gambar 1.4
ASN Berdasarkan Golongan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Bangunan gedung 3 (tiga) lantai di Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Jawa Tengah, 1 (satu) gedung kantor gudang cadangan pangan, 1 gedung eks. Toko Tani Indonesia Center (TTIC), 2 unit gudang cadangan pangan pemerintah dan lantai jemur (kapasitas 10 ton GKG), 2 unit gedung laboratorium (Ungaran dan Solo), 1 unit bangunan kantor (BPMKP Solo), 1 unit aula, 1 unit musholla, 9 unit rumah dinas;
2. Ruang rapat kecil 1 buah, kapasitas kurang lebih 100 orang dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
3. Mesin/personal komputer sebanyak 66 (enam puluh enam) unit, 30 (tiga puluh) unit laptop, 25 (dua puluh lima) UPS, dan 66 (enam puluh enam) printer;

4. 12 (dua belas) jaringan mesin telepon/fax dengan perincian sebagai berikut: mesin fax 6921997; mesin telepon 6925554, 6921046, 6921972, 6923158, 6922411, 6923412, 6921159, 6925268, 6924604 dan (0271) 851375;
5. Televisi sebanyak 16 (enam belas) unit;
6. Sebanyak 54 (lima puluh empat) *AC split*, 5 (lima) *AC floor* dan 15 (lima belas) kipas angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan ruangan;
7. LCD sebanyak 11 (sebelas) unit;
8. *Camcorder* DVD 1 (satu) unit;
9. Sepeda motor 16 (enam belas) unit, di mana 8 unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan aset;
10. 3 (tiga) unit *Rice Mill Unit* (RMU);
11. 1 (satu) unit *dryer*;
12. 1 (satu) unit Cold Storage
13. 2 (dua) paket masing-masing sebanyak 326 unit peralatan laboratorium (Solo dan Ungaran);
14. 2 (dua) unit Alat Pemotong Kertas; dan
15. 1 (satu) unit *Video Conference*.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam 4 (empat) program yaitu: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam 8 (delapan) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 35.143.885.000,-, namun setelah dilakukan perubahan anggaran sepanjang tahun 2022, maka terjadi perubahan anggaran menjadi Rp 43.528.909.000,- (tiga puluh lima milyar empat ratus enam puluh lima juta lima belas ribu rupiah) dengan komposisi anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis 1 sebesar Rp 25.321.292.000,- (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sasaran strategis 2 sebesar Rp 17.578817.000,- (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan sasaran strategis 3 sebesar Rp 628.800.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

1.5 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permenpan No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKjIP

dan aspek strategis/isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Tujuan dan Sasaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan capaian kinerja program dan kegiatan organisasi beserta analisis capaian kerjanya serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Hasil penilaian evaluasi kinerja internal dijelaskan bahwa proses evaluasi internal yang terdiri dari evaluasi program dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada umumnya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Berikut merupakan saran/rekomendasi beserta tindak lanjutnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Mulai disusun SOP dan SK terkait pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada eselon IV ke atas lingkup Dinas Ketahanan Pangan yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2023
2.	Menindaklanjuti temuan/rekomendasi BPK-RI yang belum selesai (dalam proses) status tindak lanjutnya	Temuan/rekomendasi BPK-RI sedang dalam proses selesai tindak lanjut melalui surat konfirmasi penunggak hutang terkait kegiatan Gerbang Mapan 2006

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2023 adalah:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 - 2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013 - 2018. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

a. Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

b. Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumber daya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumber daya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama ***Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. **Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2. **Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota**

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Dalam lima tahun ke depan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah ke depan tidak hanya

fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktik ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana ke depan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Sehingga

diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi Gubernur Jawa Tengah yang ke 3 yaitu **“Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”**. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan dan pembangunan yang berkeadilan. Pelaksanaan misi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang melibatkan kelompok tani, kelompok wanita tani dan kelompok masyarakat lainnya, kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi yang didukung reformasi agraria.

3. Tujuan

Meningkatkan ketahanan pangan dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

4. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas, meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
			2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)
1. Meningkatkan ketahanan pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87,36	87,72	88,08	88,44	88,8
	1.1 Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Angka Konsumsi Energi	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	70	70	70	70	70
	2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	70	70	70	70	70
	2.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	80	80	80	80	80

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan dinamika perencanaan tingkat nasional maupun daerah, telah dilakukan penyempurnaan terkait sasaran strategis dengan menyesuaikan regulasi dan kondisi saat ini. Menindaklanjuti penyesuaian terhadap kebijakan nasional (RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/L tahun 2020-2024), dampak pandemi Covid-19 dan adanya dinamika perubahan regulasi (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah), maka perlu adanya Penyelarasan/ penyesuaian/ perubahan/ harmonisasi kembali terhadap rumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi Dinas Ketahanan Pangan.

Tujuan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam

skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan yaitu meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat.

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan indikator Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari). Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang ditunjukkan dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kerjanya disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,44
		Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi)	kkal/kapita/hari	2.100
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	78
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	78
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	80,01

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	1. Penyediaan pangan pokok dan pangan lainnya merata antar waktu antar wilayah 2. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat 3. Pembangunan sistem distribusi yang efektif dan efisien 4. Promosi pencapaian target konsumsi pangan sesuai angka kecukupan gizi berbasis sumber daya lokal 5. Pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kab/kota 6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPMKP Penanganan kerawanan pangan	Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing produk pangan segar asal tumbuhan melalui penguatan penerapan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA), penguatan cadangan pangan masyarakat, pembinaan penerapan jaminan mutu pangan dan penguatan promosi produk pangan berbasis sumber daya lokal.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan Perkantoran, Kepegawaian, dan keuangan administrasi pelayanan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2022. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Anggaran yang telah disepakati antara kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2022, secara lengkap tercantum pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,44
	1.1 Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Angka Konsumsi Energi	kkal/kapita/hari	2.100
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Skor	78
	2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Skor	78
	2.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Skor	80,01

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			19.490.077.000
		CV harga pangan strategis beras	4,50%	10.258.495.000
		Angka Konsumsi Beras	92,30 kg/kap/tahun	2.680.495.000
		Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan	0,61	5.831.591.000
		Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas	3.31 kkal/kap/hari	719.495.000
	1.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			10.977.790.000
		Jumlah kelompok pangan pokok lokal substitusi beras yang difasilitasi	5 kelompok	425.000.000
		Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan	2 dokumen	294.295.000
		Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	5%	3.526.270.000
		Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan	5%	6.732.225.000
	1.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			5.831.592.000
		Persentase peningkatan volume cadangan pangan	6%	5.831.592.000
	1.3 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai			2.680.495.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi			
		Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur	86 kg/kap/tahun	573.615.000
		Konsumsi kelompok pangan hewani	33 kg/kap/tahun	1.116.207.000
		Rasio konsumsi pangan lokal	0,14	990.673.000
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan			2.759.500.000
		Persentase penurunan daerah rawan pangan	1%	2.759.500.000
	2.1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			2.759.500.000
		Prosentase penanganan daerah rawan pangan	4,45%	2.759.500.000
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan			3.071.715.000
		Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	80%	1.343.735.000
		Persentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	80%	1.727.980.000
	3.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			3.071.715.000
		Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi	10%	571.175.000
		Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi	1 laporan	322.560.000
		Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran	65%	450.000.000
		Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi	83	842.000.000

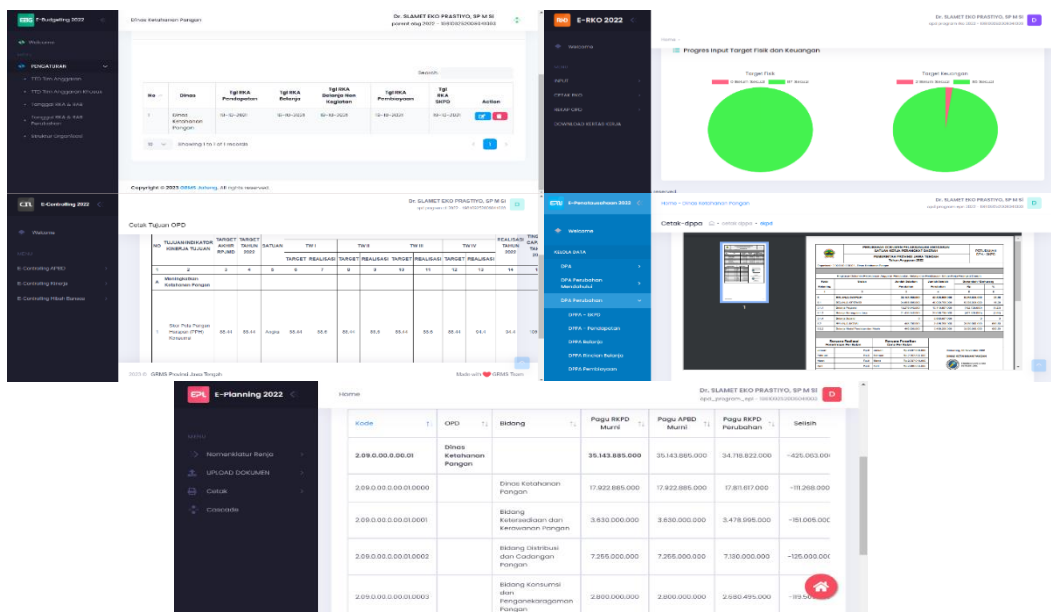
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium	67,5	885.980.000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			18.207.617.000
		Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	628.800.000
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100%	471.000.000
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	17.107.817.000
	4.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	4 dokumen	628.800.000
	4.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	13.512.327.000
	4.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	136.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	40.000.000
	4.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	225.900.000
	4.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	1.129.450.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	138.000.000
	4.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	999.200.000
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	217.800.000
	4.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.094.940.000
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	75.200.000

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung tercapainya Kinerja yang optimal dan penerapan SAKIP yang baik sebagai perwujudan *good governance*, maka Dinas Ketahanan Pangan menggunakan instrumen pendukung dari Sistem GRMS/SSO seperti e-planning, e-budgeting, e-RKO, e-penatausahaan, serta e-controlling yang wajib digunakan untuk membantu pekerjaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja SKPD.

Gambar 2.1
Instrumen Pendukung Capaian Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Menindaklanjuti pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan Instansi Pemerintah.

Untuk mengukur serta menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam mengemban visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2018 – 2023. Maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. LKjIP disusun dengan memperhatikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2022. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi Indikator masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (*Benefit*) dan dampak (*Impact*). Akan tetapi untuk sementara ini, dari lima indikator hanya digunakan tiga indikator yakni hanya sampai indikator hasil (*Outcome*) dengan argumen kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk *Benefit* dan *Impact* belum dapat dilakukan mengingat pengukuran yang relatif.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	>100%	Sangat Baik
2	85 – 100%	Baik
3	65 – 84,99%	Cukup

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
4	50 – 64,99%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Pada tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, terdapat 2 tujuan dan 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2022, yaitu:

<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketahanan pangan 2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
<p>Sasaran Strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, telah ditetapkan indikator tujuan dan sasaran strategis pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2022
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor PPH Konsumsi	Angka	88,44	94,4	106,74%	106,74%
	1. Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	Angka Konsumsi Energi	kkal/kapita/hari	2.100	2.018	96,09%	96,09%
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi PD	Nilai SKM	Angka	78	89,5	114,74%	119,33 %
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM	Angka	78	88,75	113,78%	116,68 %
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	Angka	80,01	89,64	112,15%	112,05 %

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah juga dinilai dari sasaran yang akan dicapai di tahun 2022. Untuk mengukur capaian kinerja pada Ketiga Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor PPH Konsumsi	88,44	94,4	106,74	Sangat Baik	e-controlling
1.1	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	Angka Konsumsi Energi	2.100	2.018	96,09	Baik	e-controlling
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi PD	Nilai SKM	78	89,5	114,74	Sangat Baik	e-controlling
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM	78	88,75	113,78	Sangat Baik	e-controlling
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	80,01	89,64	112,04	Sangat Baik	e-controlling

Dari tabel 3.2.1 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2022 untuk tujuan I (pertama) yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan Indikator Kinerja Skor PPH Konsumsi terealisasi sebesar 94,4 dari target 88,44 dengan capaian sebesar 106,74% dan termasuk kategori **Sangat Baik**. Tingginya capaian ini dikarenakan adanya program pemerintah terkait diversifikasi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan pertama ini adalah Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas dengan target sebesar 2.100 telah tercapai. Sasaran ini mendapatkan capaian 96,09% yang termasuk dalam kategori **Baik**. Tingkat capaian masih dibawah 100% dikarenakan ada beberapa Skor PPH ideal pada kelompok pangan tertentu yang masih perlu ditingkatkan konsumsinya, seperti pada kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayur dan buah. Upaya untuk meningkatkan angka konsumsi energi yaitu melalui kebijakan peningkatan pola konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Pada tujuan II (kedua) yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM) terealisasi sebesar 89,5 dari target 78 dengan capaian sebesar 114,74% dan termasuk kategori **Sangat Baik**. Tingginya capaian ini dikarenakan telah terkelolanya segala bentuk pelayanan dan administratif Dinas Ketahanan Pangan dengan sangat baik.

Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan kedua ini antara lain Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan target 78 dan telah terealisasi sebesar 88,75. Sasaran ini mendapatkan capaian sebesar 113,78% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Tingginya capaian ini dikarenakan telah Dinas Ketahanan Pangan memiliki tingkat pelayanan sangat baik terhadap masyarakat. Selain itu pada tujuan kedua juga memiliki sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan target 80,01 dan telah terealisasi sebesar 89,64. Sasaran ini mendapatkan capaian sebesar 112,04% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Tingginya capaian ini dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang sangat baik melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja berorientasi pada hasil (outcome).

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2020 - 2022

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Real.	Capaian %	Target	Real.	Capaian %	Target	Real.	Capaian %
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor PPH Konsumsi	87,72	87,1	99,29	88,08	86,67	98,39	88,44	94,4	106,74
1.1	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	Angka Konsumsi Energi	2.150	2.048	95,26	2.150	2.054,43	95,56	2.100	2.018	96,09
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi PD	Nilai SKM	70	81,95	117,06	70	81,5	116,43	78	89,5	114,74
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM	70	81,94	117,06	70	82,75	118,21	78	88,75	113,78
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	80	89,67	112,09	80	89,73	112,16	80,01	89,64	112,04

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja tujuan 1 dari tahun 2020 hingga 2022 capaian realisasinya meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya program pemerintah terkait diversifikasi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dan semakin kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Pada sasaran strategis 1 pada tahun 2022 yaitu Angka Konsumsi Energi menurun seiring dengan perubahan target pada tahun

2022 namun memiliki tingkat capaian yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Merujuk pada tabel di atas dapat dilihat bahwa selalu terdapat peningkatan nilai dan capaian kinerja mulai dari tahun 2020 hingga 2022 pada tujuan kedua, sasaran strategi dua dan sasaran strategis tiga. Peningkatan capaian ini disebabkan oleh meningkatnya tata kelola organisasi, kualitas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan terhadap masyarakat, sehingga berdampak positif pada semakin terpuaskannya masyarakat terhadap pelayanan Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan selalu memperbaiki akuntabilitas kinerja sehingga memiliki nilai SAKIP yang selalu meningkat

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Target Akhir Renstra 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra (2023)	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor PPH Konsumsi	94,4	88,80	106,30
1.1	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	Angka Konsumsi Energi	2.018	2.150	93,86
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi PD	Nilai SKM	89,5	70	127,86
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM	88,75	70	126,78
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	89,64	80	112,05

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan melebihi target akhir Renstra yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Tingginya capaian tujuan dan sasaran pertama dibuktikan melalui perhitungan Skor PPH dan Angka Konsumsi Energi yang mendapatkan hasil sebesar 94,4 dan 2.018 kkal/kap/tahun, sedangkan pada tujuan dan sasaran kedua dapat dilihat melalui hasil survei kepuasan masyarakat yang mendapatkan hasil memuaskan dengan nilai 87,75 dan meningkatnya nilai SAKIP sebesar 89,64 pada Tahun 2022 yang termasuk predikat Memuaskan (A). Pada hasil Sasaran Strategis 1 belum melampaui target Renstra 2023 dikarenakan masih perlu adanya peningkatan konsumsi ideal terutama pada komoditas umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah.

3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor PPH Konsumsi	88,44	94,4	106,74	Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)	-
1.1	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	Angka Konsumsi Energi	2.100	2.018	96,09	Terdapat beberapa Skor PPH ideal pada kelompok pangan tertentu yang masih perlu ditingkatkan konsumsi idealnya, seperti pada kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayur dan buah	Upaya yang dilakukan melalui kebijakan peningkatan pola konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi PD	Nilai SKM	78	89,5	114,74	Terdapat peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	-
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM	78	88,75	113,78	Terdapat peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	-
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	80,01	89,64	112,04	Terdapat peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan	-

Dari tabel 3.6 di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sangat baik. Tujuan I (pertama) berupa Skor PPH melebihi 100%, yaitu 106,74%. Hal tersebut karena adanya program pemerintah terkait diversifikasi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dan semakin kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Selain itu pada sasaran I (pertama) yaitu Angka Konsumsi Energi terealisasi sebesar 2.018 dengan capaian 96,09%. Belum tercapainya sasaran pertama dikarenakan masih perlu adanya peningkatan konsumsi ideal terutama pada komoditas umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah.

Pada Tujuan II (kedua) yaitu Meningkatkan tata Kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat terealisasi dengan nilai 88,75 dari target 78 tingginya realisasi ini disebabkan oleh peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pada sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah memiliki tingkat ketercapaian kinerja sebanyak 113,78% dikarenakan adanya peningkatan kualitas pelayanan dengan dibuktikan dengan

adanya apresiasi Ketua KIP Jawa Tengah terhadap Dinas Ketahanan Pangan dalam Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng atas langkah progresif dalam mewujudkan PPID, dan untuk sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah memiliki tingkat ketercapaian 112,04% karena adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Peningkatan capaian kinerja ini berupa kelengkapan data yang semakin baik dan peningkatan kualitas dokumen yang dihasilkan.

3.2.5 Analisis atas Efisiensi Penganggaran Sumber Daya

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	88,44	94,4	106,74	25.321.292.000	23.741.988.647	93,76	12,15%
1.1	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	2.100	2.018	96,09	25.321.292.000	23.741.988.647	93,76	0%
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi PD	78	89,5	114,74	18.207.617.000	17.890.048.349	98,26	14,36%
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	78	88,75	113,78	17.578.817.000	17.265.609.415	98,22	13,67%
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	80,01	89,73	112,15	628.800.000	624.438.934	99,31	11,45%
Rata - Rata								10,33%

Berdasarkan rumusan efisiensi sumber daya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi: capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (\sum) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (\sum) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran I
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran I
 CKi : Capaian keluaran I

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran Nilai hasil rata-rata penghitungan efisiensi yang didapatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebesar 10,33%. Sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 214 /PMK.02/2017 Tahun 2017, bahwa batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%, maka dapat dikatakan penggunaan sumber daya di Dinas Ketahanan Pangan masuk dalam kategori **efisien**. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah secara efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada tahun 2022.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.8
Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	106,739				Menunjang
	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	Angka Konsumsi Energi	96,09				
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	CV harga pangan strategis beras	210,28	Menunjang
					Angka Konsumsi Beras	105,01	Menunjang
					Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan	395,08	Menunjang
					Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas	101,77	Menunjang
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi	Jumlah kelompok pangan pokok lokal substitusi beras yang di fasilitasi	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Pasokan dan Harga Pangan			
					Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan	100	Menunjang
					Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	1.671,2	Menunjang
					Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan	333,4	Menunjang
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase peningkatan volume cadangan pangan	143,50	Menunjang
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur	108,02	Menunjang
					Konsumsi kelompok pangan hewani	110	Menunjang
					Rasio konsumsi pangan lokal	121,43	Menunjang
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan daerah rawan pangan	5.873	Menunjang
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Prosentase penanganan daerah rawan pangan	399,78	Menunjang
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	100,99	Menunjang
					Persentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	113,45	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi	100	Menunjang
					Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi	100	Menunjang
					Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran	133,29	Menunjang
					Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi	112,05	Menunjang
					Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium	138,06	Menunjang
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	114,743				Menunjang
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	113,782				Menunjang
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	112,148				Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang

a. Capaian Target Kinerja Program dalam Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang optimal, efektif, dan tepat sasaran, Dinas Ketahanan Pangan memiliki program dan kegiatan yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan antara lain Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Pada tabel 3.8 di atas disampaikan bahwa capaian pada 4 program dan 13 kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah 100% dan terdapat capaian yang melampaui 100%.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat memiliki realisasi capaian di atas 100%. Program ini memiliki 4 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas dengan target 3.731 kkal/kapita/hari telah terealisasi sebesar 3.797 kkal/kapita/hari, CV harga pangan strategis (beras) dengan target 4,50% telah terealisasi sebesar 2,14%, Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan dengan target 0,61 telah terealisasi sebesar 2,41 dan Angka Konsumsi Beras dengan target 92,30 kg/kapita/tahun telah terealisasi sebesar 87,90 kg/kapita/tahun. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal. Seluruh indikator kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat telah tercapai sesuai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan.

Program Penanganan Kerawanan Pangan memiliki realisasi capaian di atas 100%. Program ini memiliki 1 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase penurunan daerah rawan pangan dengan target 1% telah terealisasi sebesar 58,73%. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan

indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal dan telah tercapai sesuai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan. Manfaat program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang mandiri.

Program Pengawasan Keamanan Pangan memiliki realisasi capaian di atas 100%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan dengan target 80% telah terealisasi sebesar 80,79% dan Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan dengan target 80% telah terealisasi sebesar 90,76%. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal dan telah tercapai sesuai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan. Manfaat program ini bertujuan agar produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga yang lebih baik dibandingkan pangan yang belum bersertifikat.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki realisasi capaian 100%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 ketiga indikator tersebut dengan target sebesar 100% telah terealisasi. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal dan telah tercapai sesuai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan. Manfaat program ini bertujuan dalam rangka menunjang terlaksana dan tersedianya serta terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi keuangan dan penunjang pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan.

b. Capaian Target Kinerja Output Kegiatan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan didukung oleh 3 kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, dan Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi

Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.

- 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain jumlah kelompok pangan pokok lokal substitusi beras yang difasilitasi, jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan, presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga, dan peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan.

Realisasi indikator kegiatan jumlah kelompok pangan pokok lokal substitusi beras yang difasilitasi dari target 5 kelompok tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan target keluaran 5 paket telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp.425.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.420.937.500,- atau telah terserap 99,04 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan dari target 2 dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan dengan target keluaran 1 Laporan telah tercapai 100%. Laporan rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2022. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.294.495.000,- dengan realisasi anggaran Rp.292.970.368,- atau terserap 99,48 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan.

Realisasi indikator kegiatan presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga dari target 5% tercapai dengan tingkat capaian 1.671,2%. Indikator kinerja ini didukung oleh Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan target keluaran 1 laporan Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan melalui sistem logistik daerah dan 1 paket Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI) Center telah tercapai 100%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan melakukan pengembangan SISLOGDA, melalui kegiatan:

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Pangan;
- 2) Penguatan sarana prasarana pendukung SISLOGDA;
- 3) Fasilitasi distribusi pangan;

- 4) Pengembangan kelembagaan distribusi pangan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP); dan
- 5) Penyusunan regulasi SISLOGDA.

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp.2.716.470.000,- dengan realisasi anggaran Rp.2.524.389.138,- atau telah terserap 92,93 persen, terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 192.080.862,- dikarenakan ketidakcukupan waktu pelaksanaan kegiatan dimana sumber dana DID baru muncul di anggaran perubahan tahun anggaran 2022.

Selain itu, indikator kegiatan presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga juga didukung oleh Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan target keluaran sebanyak 28 gabungan kelompok tani (gapoktan) yang difasilitasi stimulan gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp.809.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp.808.178.500,- atau telah terserap 99,80 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan dari target 5% tercapai dengan tingkat capaian 333,4%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan dengan target keluaran 4 kali intervensi harga pangan strategis (beras, cabai, dan bawang merah) telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Adanya intervensi pada komoditas penting (beras, cabai, dan bawang merah) dapat meningkatkan kestabilan harga dari tingkat produsen hingga ke konsumen. Kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp.6.732.225.000,- dengan realisasi anggaran Rp.5.414.810.300,- atau terserap 80,43 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, terdapat sisa anggaran Rp.1.317.414.700,- atau sebesar 19,57 persen dikarenakan ketidakcukupan waktu pelaksanaan kegiatan.

2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah persentase peningkatan volume cadangan pangan.

Realisasi indikator kegiatan persentase peningkatan volume cadangan pangan dari target 6% tercapai dengan tingkat capaian 143,50%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi dengan target keluaran 28 unit Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang difasilitasi telah tercapai dengan tingkat capaian 100% dan target 200 ton Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disediakan terealisasi 497,52 ton (tingkat capaian 248,76%), sebagaimana terinci dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9
Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah

No.	Stock/Distribusi	Gabah (Kg)	Setara Beras (Kg)
1	Stock Per 31 Desember 2021	379.550	7.485
2	Pengadaan Tahun 2022	234.715	
3	Jumlah CPP Dikelola Tahun 2022	614.265	
4	Jumlah gabah digiling	293.650	170.590
5	Jumlah distribusi beras		172.190
6	Penyusutan		710
7	Stock Per 30 Desember 2022		5.175

Provinsi Jawa Tengah di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan mengelola cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi penanganan masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, baik karena terjadinya bencana, anomali iklim, gagal panen, gejolak harga atau kemiskinan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.831.592.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.791.795.954,- atau terserap 99,32 persen.

- 3) Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain konsumsi kelompok pangan buah dan sayur, konsumsi kelompok pangan hewani, dan rasio konsumsi pangan lokal.

Realisasi indikator kegiatan konsumsi kelompok pangan buah dan sayur dari target 86 kg/kapita/tahun tercapai dengan tingkat capaian 108,02%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan target keluaran 3 kali telah tercapai dengan tingkat capaian 133,33%, yaitu melalui kegiatan Promosi dan Edukasi Pangan B2SA, Gerakan Konsumsi Pangan B2SA dan Promosi Pangan B2SA. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 573.615.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 572.181.899,- atau terserap 99,75 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan konsumsi kelompok pangan hewani dari target 33 kg/kapita/tahun tercapai dengan tingkat capaian 110%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan 2 target keluaran: (I) 30 kelompok penerima stimulan benih/bibit tanaman untuk Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (OPP) telah tercapai dengan tingkat capaian 100%; (II) 1 laporan analisa Pola Pangan Harapan (PPH) yang disusun telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.

1.116.207.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.110.699.700,- atau terserap 99,50 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan rasio konsumsi pangan lokal dari target 0,14 tercapai dengan tingkat capaian 121,43%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan target keluaran 22 kelompok Pengembangan Pangan Olahhan yang Difasilitasi di 14 kabupaten dan 3 kelompok Pengembangan Pangan Pokok Lokal yang Difasilitasi di 3 kabupaten (Semarang, Wonosobo dan Klaten) telah tercapai 100%. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.990.673.000,- dengan realisasi anggaran Rp.984.534.870,- atau terserap 99,38 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Program Penanganan Kerawanan Pangan didukung oleh 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi. Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah prosentase penanganan daerah rawan pangan. Realisasi indikator kegiatan prosentase penanganan daerah rawan pangan dari target 4,45% tercapai dengan tingkat capaian 399,78% atau sebanyak 111 kecamatan di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami rawan pangan telah tertangani. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi dengan target keluaran 30 desa yang diberdayakan di 21 kabupaten sebagai upaya penanganan kerawanan pangan dan 1 laporan Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Upaya yang dilakukan yaitu melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan (DMP). Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.759.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.754.172.700,- atau terserap 99,80 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Program Pengawasan Keamanan Pangan didukung oleh 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan *Higiene* Sanitasi, jumlah informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi, persentase PSAT teregistrasi di peredaran, tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi, dan tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium.

Realisasi indikator kegiatan persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan *Higiene* Sanitasi dari target 10% tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub

kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi dengan target keluaran 20 kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam pengembangan kelembagaan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Upaya yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja yaitu pengembangan kelembagaan pelaku usaha Pangan Angkringan Warga (PAW) dan pengembangan kelembagaan fasilitasi peralatan pendukung mutu dan keamanan pangan berupa pembinaan hygiene sanitasi. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.571.175.000,- dengan realisasi anggaran Rp.570.643.400,- atau terserap 99,90 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan jumlah informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi dari target 1 laporan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan target keluaran 225 orang yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.322.560.000,- dengan realisasi anggaran Rp.321.069.600,- atau terserap 99,54 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan persentase PSAT teregistrasi di peredaran dari target 65% tercapai dengan tingkat capaian 133,29%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil 2 keluaran: (I) 2 dokumen kajian hasil pengawasan keamanan pangan segar yang disusun oleh tim seksi pengawasan pangan dan fungsional pengawas mutu hasil pertanian telah tercapai dengan tingkat capaian 200%; (II) 250 sampel pangan segar yang diawasi telah tercapai dengan tingkat capaian 120% dengan hasil uji keamanan pangan pada komoditas cabai merah keriting, kubis, kacang tanah, beras curah dan beras kemasan yang dilakukan pada pasar tradisional di Jawa Tengah. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.427.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp.425.942.884,- atau terserap 99,64 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi dari target 83 tercapai dengan tingkat capaian 112,05%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan target keluaran 35 sertifikat dengan tingkat capaian 334,29%. Sertifikat yang diterbitkan antara lain 75 nomor pendaftaran PSAT, 24 sertifikat SPPB-PSAT, 2 sertifikat Prima 3, 19 *Health Certificate* (HC), 6 sertifikat Packing House (PH). Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.842.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.841.601.909,- atau terserap 99,95 persen, dengan demikian

penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium dari target 67,5 tercapai dengan tingkat capaian 138,06%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan target keluaran 60 sampel telah tercapai 1.008,33 persen. Tingginya capaian tersebut dikarenakan adanya kemudahan akses bagi pelaku usaha dalam mengajukan sampel untuk diuji. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.885.980.000,- dengan realisasi anggaran Rp.885.559.925,- atau terserap 99,95 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi didukung oleh 7 kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun.

Realisasi indikator kegiatan jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun dari target 4 dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 2 dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 306.800.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 303.606.640, atau terserap 98,95%, dengan tercapainya target penyusunan dokumen perencanaan yang terdiri atas dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 dan dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam penyediaan data dalam penyusunan draf Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (RKPD) Tahun 2023.

Selain itu, indikator kinerja kegiatan ini juga didukung oleh sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 2 dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 322.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 320.832.294 atau terserap 99,63%, dengan tercapainya target penyusunan dokumen evaluasi yang terdiri atas dokumen Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Laporan Tahunan Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam penyediaan data dalam penyusunan draf laporan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2021.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 12.781.127.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.699.632.295 atau terserap 99,36%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik. Selanjutnya juga didukung oleh sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 335.760.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 325.260.000 atau terserap 96,87%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik. Dan serta didukung oleh sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 2 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 395.440.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 392.817.852 atau terserap 99,33%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dan jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 100.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 99.267.759 atau terserap 99,26%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik. Selain itu, indikator kinerja ini juga didukung oleh sub kegiatan

penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan target 1 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 36.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 35.328.250 atau terserap sebesar 98,13%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 40.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 38.205.144 atau terserap 95,51%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah. Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 225.900.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 224.647.120 atau terserap 99,44%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah dan jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 20.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.000.000 atau terserap 100%. Sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 25 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 290.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 282.196.600 atau terserap 97,30%. Selanjutnya didukung oleh sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan

anggaran dana sebesar Rp 30.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 28.070.619 atau terserap 93,56%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 90.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 85.965.779 atau terserap 95,51%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar 12.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar 12.000.000 atau terserap 100%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu fasilitasi kunjungan tamu dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 50.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 47.849.300 atau terserap 95,69%. Selanjutnya sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 539.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 538.887.012 atau terserap 99,97%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.000.000 atau terserap 100%. Dan terakhir, indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dengan target 1 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 88.450.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 86.913.220 atau terserap 98,26%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 10.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.947.900 atau terserap 99,47%. Sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 5 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 70.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 69.409.890 atau terserap 99,15%. Selanjutnya didukung oleh sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 10.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.883.550 atau terserap 98,83%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu penyediaan

barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 5.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.964.000 atau terserap 99,28%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar 5.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar 4.981.000 atau terserap 99,62%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu fasilitasi kunjungan tamu dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 8.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.991.000 atau terserap 99,88%. Dan terakhir, indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 30.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 29.974.000 atau terserap 99,91%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 12.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.000.000 atau terserap 100%. Sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 362.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 225.494.980 atau terserap 62,29%. Dan terakhir, indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 625.200.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 624.195.022 atau terserap 99,83%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 3.000.000

dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.000.000 atau terserap 100%. Sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 120.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 99.063.171 atau terserap 82,55%. Dan terakhir, indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 94.800.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 94.702.452 atau terserap 99,89%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dan jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 378.940.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 356.225.400 atau terserap 94%. Sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target 2 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 628.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 613.556.500 atau terserap 97,70%. Dan terakhir, indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 88.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 87.979.600 atau terserap 99,97%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target 1 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 55.200.000 dengan realisasi anggaran

sebesar Rp 55.200.000 atau terserap 100%. Dan juga didukung oleh sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.000.000 atau terserap 100%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung dengan APBD sebesar Rp.35.143.885.000,-, namun setelah dilakukan perubahan, maka terjadi perubahan anggaran menjadi Rp.43.528.909.000,- (empat puluh tiga milyar lima ratus juta dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) terserap sebesar Rp. 41.632.036.996,- (95,64%) secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 38.178.051.056,-
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 3.453.985.940,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagaimana tersaji pada tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	19.490.077.000	17.920.498.229	91,95
	1.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10.977.790.000	9.461.285.806	86,19
	1.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	5.831.592.000	5.791.795.954	99,32
	1.3 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.680.495.000	2.667.416.469	99,51
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.759.500.000	2.754.172.700	99,81

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	2.1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.759.500.000	2.754.172.700	99,81
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	3.071.715.000	3.067.172.700	99,86
	3.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.071.715.000	3.067.172.700	99,86
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.207.617.000	17.890.048.349	98,26
	4.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	628.800.000	624.438.934	99,31
	4.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.512.327.000	13.417.710.147	99,30
	4.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	176.000.000	172.801.152	98,18
	4.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	225.900.000	224.647.120	99,45
	4.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.267.450.000	1.259.033.870	99,36
	4.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.217.000.000	1.058.455.625	86,97
	4.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.170.140.000	1.132.961.000	96,68

Apabila ditinjau dari sisi penyerapan, anggaran sebesar Rp. 43.528.909.000,- terserap Rp. 41.632.036.996,- (95,64%). Sisa anggaran Rp.1.896.872.004,- (4,4%) berasal dari:

- a. Sisa dana insentif daerah terkait subsidi harga sebesar Rp 1.317.414.700,-;
- b. Dana did utk fasilitasi distribusi pangan (dari luar provinsi ke provinsi jawa tengah) tersisa sebesar Rp 121.380.000,- dikarenakan ketidakcukupan waktu pelaksanaan kegiatan yang baru dilaksanakan pada bulan November dan Desember;
- c. Sisa gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 94.616.853,-;
- d. Sisa listrik air telfon sebesar Rp 154.441.849,- dikarenakan adanya kerusakan cold stotage dan belum diperbaikinya alat lab ditahun 2022 sehingga penyerapan anggaran listrik tidak optimal;
- e. Optimalisasi pengadaan dan kegiatan.

Realisasi serapan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 95,64% dapat dikategorikan **Sangat Baik**, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 92,26%.

Dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga dengan tercapainya indikator sasaran maka sisa anggaran dapat dikategorikan sebagai efisiensi karena berasal dari selisih atas negosiasi belanja barang dan jasa serta optimalisasi perjalanan dinas.

3.4 Inovasi

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan untuk menaikkan kesejahteraan petani serta pendapatan petani maka Dinas Ketahanan Pangan membentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Badan Usaha Milik Petani (BUMP) merupakan lembaga usaha berbadan hukum yang mensinergikan kegiatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dijalankan secara korporasi berorientasi keuntungan untuk mendorong kemandirian petani, bertujuan untuk melindungi petani dari risiko harga jatuh, meningkatkan pendapatan petani, mempermudah akses penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan.

Prinsip BUMP melalui model inovasi kelembagaan ekonomi petani untuk mengangkat pendapatan petani dan strategi konsolidasi dan sinergi sumber daya yang sudah ada berbasis modal sosial dan kearifan lokal (Gotong Royong). Prinsip BUMP juga mengkonsolidasikan seluruh *stakeholders* (pemerintah, swasta/pengusaha, NGO, Perguruan Tinggi, tengkulak) dimasukkan dalam suatu sistem dengan prinsip gotong royong sebagai suatu kekuatan.

Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang telah berhasil didirikan oleh Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 11 BUMP dengan rincian pada tabel 3.11.

**Tabel 3.11 Badan Usaha Milik Petani (BUMP)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

NO	KABUPATEN	NAMA BUMP	ALAMAT BUMP	JUMLAH PETANI (JIWA)	LUAS LAHAN (Ha)
1	Sukoharjo	BUMP PT. Sukoharjo Makmur Pangan Nusantara	Dusun Karanganyar RT 01 RW 05, Desa Bugel, Kec. Polokarto, Kabupaten Sukoharjo	5.067	1.891
2	Blora	BUMP PT. Berkah Makmur Sentosa	Jl. Aryo Jipang RT.01 RW.03 Desa Getas, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	122	186,53
3	Purbalingga	BUMP PT. Lumpang Mas Purbalingga	Dusun Kajongan RT 01 RW 09, Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari	4.409	1.501,28

NO	KABUPATEN	NAMA BUMP	ALAMAT BUMP	JUMLAH PETANI (JIWA)	LUAS LAHAN (Ha)
4	Jepara	BUMP PT. Kalingga Makmur Sejahtera	Desa Jlegong RT 01 RW 01 Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara	7.555	2.259,57
5	Kebumen	BUMP PT. Kebumen Maju Makmur	Dukuh Karangwunung RT 01 RW 03, Desa Kuwaru, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen	215	200
6	Banyumas	BUMP PT. Bawor Tani Sejahtera	Jalan Raya Tamansari Dusun III RT 01 RW 01, Desa Tamansari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas	1.373	976,76
7	Pati	BUMP PT. Damar Waluyo Tani	Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati	253	271
8	Rembang	BUMP PT. Rembang Pangan Gemilang	Desa Wuwur RT 01 RW 01, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang	811	1.277,38
9	Cilacap	BUMP PT. Wijaya Kusuma Pangan Mandiri	Jl. Hansip Barat No. 4444 A, Desa Maos Kidul, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap	1.991	1.616,08
10	Purworejo	BUMP PT. Tani Purworejo Makmur	Desa Wirun RT 02 RW 02, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo	165	42,1
11	Jepara	BUMP PT. Ragas Tani Makmur	Dk Kedungsari RT 04 RW 01, Desa Clering, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara	906	284

3.5 Penghargaan

Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan beberapa penghargaan pada tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan penghargaan SAKIP pada Bulan Oktober 2022 dengan hasil penilaian sebesar 89,64 dan termasuk dalam kategori A (Memuaskan) yang dianggap memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel;

Gambar 3.1 Penerimaan Penghargaan SAKIP Tahun 2022



2. Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan penghargaan sebagai SKPD Provinsi Jawa Tengah dengan kategori "Menuju Informatif" pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 tanggal 17 Desember 2022;

Gambar 3.2 Penerimaan Penghargaan KIP Award Tahun 2022



3. Dinas Ketahanan Pangan dinobatkan oleh Badan Pangan Nasional pada 31 Desember 2022 sebagai provinsi dengan pengawasan pangan segar terbaik di Indonesia. Pengawasan tersebut dijalankan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Jawa Tengah.

Gambar 3.3 Sertifikat Penobatan OKKP-D dengan Profil Terbaik oleh Badan Pangan Nasional



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan **kategori Sangat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:
 - a. Capaian kinerja **sasaran 1** meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas tercapai sebesar **96,09%** atau kategori **Baik**.
 - b. Capaian kinerja **sasaran 2** meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah tercapai sebesar **113,78%** atau kategori **Sangat Baik**.
 - c. Capaian kinerja **sasaran 3** meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah tercapai sebesar **112,15%** atau kategori **Sangat Baik**.
2. Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 antara lain:
 - a. Penurunan konsumsi beras namun belum diimbangi dengan peningkatan konsumsi pangan lainnya secara beragam.
 - b. Perlu meningkatkan konsumsi pada komoditas umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayur dan buah.
 - c. Adanya fluktuasi harga dan pasokan pangan pokok strategis, rantai pasok yang cukup panjang dan disparitas harga di tingkat produsen dan konsumen.
 - d. Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi yang disebabkan berbagai faktor antara lain kemiskinan, keterbatasan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah, bencana alam dan belum pulih akibat pandemi *Covid-19*.
 - e. Belum terpenuhinya standar level penerapan hygiene sanitasi pelaku usaha PSAT dan masih belum terpenuhi standar mutu beras yang diproduksi oleh produsen atau pengemas beras serta masih banyak beredarnya pangan segar asal tumbuhan yang belum aman karena belum tersertifikasi.

B. Rekomendasi

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan program diversifikasi pangan pokok non beras dan pangan olahan lokal dengan penyediaan stimulan pangan berbasis sumber daya lokal dan alat pengolah pangan lokal untuk meningkatkan konsumsi pangan karbohidrat non beras.
2. Penyediaan stimulan benih dan bibit tanaman serta ternak untuk mendorong peningkatan konsumsi buah, sayur dan pangan hewani melalui kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (OPP) dan Desa Mandiri Pangan (DMP), untuk meningkatkan konsumsi masyarakat di masa pandemi serta melakukan

sosialisasi dan edukasi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) kepada masyarakat.

3. Meningkatkan intervensi harga pangan melalui Pasar Tani dan Toko Tani Center yang menyediakan dan menjual komoditas strategis dengan harga terjangkau serta memberikan fasilitasi distribusi (transportasi dan bongkar muat) untuk mendistribusikan komoditas pangan strategis (gula, daging, telur, bawang merah, bawang putih dan sayuran) dari tempat dengan suplai berlebih (daerah produsen) ke tempat yang defisit pasokan (daerah konsumen) sehingga produsen mendapat harga wajar dan konsumen mendapat harga yang terjangkau. Di samping itu dengan penguatan kelembagaan distribusi pangan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan daya saing petani, sehingga berdampak pada stabilitas harga komoditas dari sisi produsen.
4. Memperkuat cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam waktu yang cepat akibat terjadinya rawan pangan yang disebabkan oleh bencana alam maupun akibat yang lain.
5. Meningkatkan pendampingan melalui pelatihan higiene sanitasi dan pembinaan pelaku usaha terkait mutu dan keamanan PSAT, sehingga dapat meningkatkan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Ungaran, Februari 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006